



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NIZAR ALI
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 457098

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.470.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/174 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 527 m2/200 m2 di KAB / KOTA JEPARA, WARISAN Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m2/250 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 163.000.000

1. MOTOR, HONDA NF 100 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GO3 1,5 VTI.AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 1241 CF Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, SUZUKI FU 150 SCD Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.114.829.340



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.747.829.340
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.747.829.340

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.